

MASYARAKAT MUSLIM THAILAND DAN DAMPAK PSIKOLOGIS KEBIJAKAN ASIMILASI BUDAYA

Bayu Mitra Adhyatma Kusuma

Abstrak

Thailand merupakan sebuah negara berpenduduk mayoritas Budha dengan sebagian kecil lainnya beragama Islam dan Konghucu. Lebih dari itu Budha juga ditetapkan sebagai agama resmi negara. Muslim di Thailand pada umumnya tinggal di wilayah selatan khususnya provinsi Pattani, Yala, Narathiwat ditambah sebagian Satun dan Songkhla. Sebagaimana kondisi masyarakat minoritas pada umumnya, Melayu Muslim di Thailand kerap mendapatkan tindakan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk diskriminasi terberat yang dialami oleh minoritas Melayu Muslim di Thailand adalah kebijakan asimilasi budaya yang diterapkan secara paksa oleh pemerintah Thailand sejak rezim Jenderal Phibul Songkhram, dimana dalam kebijakan tersebut Thai Budha ditetapkan sebagai identitas dan budaya tunggal Thailand. Kebijakan asimilasi budaya adalah bentuk nyata perang psikologi melalui kekerasan kultural yang dilakukan untuk menghapus budaya Melayu Islam di seluruh wilayah Thailand. Dalam kebijakan tersebut terdapat larangan penggunaan nama, bahasa dan identitas Melayu Islam lainnya dalam kehidupan masyarakat. Terlebih untuk dapat diterima di sekolah negeri dan bekerja instansi pemerintah, identitas Melayu Muslim relatif harus ditanggalkan. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat Melayu Muslim mengalami culture shock berat yang membuat mereka menjadi sangat tertekan. Lebih dari itu kebijakan asimilasi budaya juga menciptakan stigma bahwa Melayu Muslim adalah kelompok kriminal dibalik jubah agama yang kemudian memunculkan kecurigaan terutama dari etnis Thai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data model interaktif Miles dan Huberman.

Kata Kunci: *Muslim Thailand, Dampak Psikologis, Kebijakan Asimilasi Budaya*

A. Pendahuluan

Kerajaan Thailand adalah sebuah negara yang secara geografis terletak di antara benua Australia dan daratan utama Tiongkok. Kondisi geografis tersebut membuat posisi Thailand relatif strategis dan mudah dijangkau untuk kegiatan perdagangan maupun penyebaran agama. Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha aliran Theravada dimana Budha juga merupakan agama resmi negara. Sedangkan sebagian kecil lainnya memeluk agama Islam dan Konghucu. Meskipun di Thailand Islam merupakan agama minoritas yang populasinya kurang dari lima persen penduduk Thailand, namun Islam di

Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah Konghucu.¹ Populasi Muslim di Thailand mayoritas berada di wilayah selatan yaitu di Provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat ditambah dengan sebagian Satun dan Songkhla. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara Malaysia dimana penduduknya terdiri dari etnis Melayu.

Muslim memiliki pengalaman panjang baik hidup sebagai minoritas maupun mayoritas di suatu kawasan. Seperti kondisi Muslim sebagai kelompok minoritas di kota Makkah dimana kemudian Muslim hijrah ke Abyssinia dan Madinah.² Sebagaimana halnya dengan kondisi kelompok minoritas di berbagai belahan dunia yang lain, kawasan Thailand selatan yang menjadi basis masyarakat Melayu Muslim merupakan sebuah daerah rawan konflik dengan latar belakang agama dan etnis. Terlebih Thailand beberapa kali dipimpin oleh rezim yang sangat mendiskriminasi masyarakat Melayu Muslim. Salah satu rezim yang paling diskriminatif bahkan represif adalah rezim Jenderal Phibul Songkhram dimana masyarakat Melayu Muslim telah menjadi mangsa dasar asimilasi kebudayaan.³ Dalam kebijakan asimilasi tersebut Melayu Muslim dipaksa untuk menanggalkan identitas mereka dan mengganti dengan segala bentuk identitas bercorak Thailand dan Budha.

Konflik berkepanjangan yang melibatkan kelompok minoritas Muslim di Kawasan Asia Tenggara sebenarnya bukan hanya terjadi di Thailand, namun juga di Filipina. Namun yang membedakan adalah konstelasi konflik di Filipina Selatan sudah mulai mereda ketika Presiden Benigno Aquino mengajukan proposal legislasi kepada Parlemen Filipina untuk mensahkan kebijakan pemberian otonomi lokal khusus kepada masyarakat Muslim Moro di Filipina selatan. Sedangkan di Thailand hingga saat ini komunitas Melayu Muslim minoritas khususnya di wilayah selatan masih terus menghadapi diskriminasi yang kompleks serta teror yang massif dan terjadi secara terus-menerus sehingga kehidupan sosial dan politik mereka menjadi sangat terkekang. Masyarakat Melayu Muslim pun melakukan perlawanan untuk membela etnis dan agamanya, sebagaimana dikemukakan Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* bahwa manusia secara fitrah telah dianugerahi rasa cinta

¹ Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand* [Sejarah dan Politik Muslim di Thailand], (Bangkok: Thammasat University, 2003), hlm. 3.

² M. Yasin Mazhar Siddiqi, *The Prophet Muhammad SAW: A Role Model for Muslim Minorities* [Nabi Muhammad SAW: Sebuah Model Peran Untuk Minoritas Muslim], (Leicestershire: The Islamic Foundation, 2006).

³ Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1885-1954*, (Negeri Sembilan: Saremban, 2004), hlm. 2.

terhadap garis keturunan dan golongannya. Rasa cinta ini menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta harga diri kelompok.⁴ Berdasarkan pemaparan di atas maka menjadi menarik untuk menelisik secara lebih detail tentang bagaimanakah kehidupan masyarakat Melayu Muslim minoritas di Thailand serta dampak psikologis penerapan kebijakan asimilasi budaya yang diterapkan oleh pemerintah Kerajaan Thailand. Oleh karena itu penulis berketetapan untuk mengambil sebuah judul penelitian yaitu “Masyarakat Muslim Thailand Selatan dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya”.

B. Gambaran Umum Masyarakat Muslim di Thailand

Islam tidak serta merta ada di Thailand (dahulu disebut Siam kemudian Muangthai). Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Asia Tenggara dengan kantong utama adalah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Akan tetapi Islam adalah agama minoritas di daratan utama Asia Tenggara yang telah dihuni oleh penganut Hindu dan Budha jauh sebelum Islam datang sekitar abad ke-9.⁵ Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwasanya Muslim di Thailand mayoritas hidup di wilayah selatan terutama Provinsi Pattani. Di Pattani populasi Muslim mencakup 80% dari keseluruhan Muslim di Thailand.⁶

Pada awalnya Pattani merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di wilayah selatan Thailand dengan mayoritas penduduk etnis melayu yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman. Pada saat itu Kerajaan Siam terus menerus berusaha menguasai Pattani dengan cara agresi namun selalu gagal. Hingga pada pemerintahan Sultan Muzhaffar, Pattani menuju zaman keemasannya sehingga semakin menarik Siam untuk kembali menyarang Pattani dan akhirnya dapat menguasainya setelah perang bertahun tahun.⁷ Kerajaan Siam begitu bernafsu untuk segera menguasai wilayah Kesultanan Pattani karena karena daerah Pattani merupakan daerah yang maju dan strategis untuk disinggahi ataupun untuk kegiatan niaga. Dari sinilah awal mula benturan yang melibatkan kelompok

⁴ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 81.

⁵ Thanet Aphornsuwan, *History and Politics of the Muslim...* hlm. 7.

⁶ Bayu Mitra Adhyatma Kusuma dan Theresia Octastefani, *Pattani United Liberation Organization: From Jihad to Local Politics Movement* [Organisasi Pembebasan Pattani Bersatu: Dari Jihad ke Gerakan Politik Lokal], dipresentasikan di National Conference and Call for Papers Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, (Jakarta, 25-26 Februari 2016), hlm. 2.

⁷ Al-Habib Alwi, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 139-140.

etnis Melayu Muslim dengan Thai Budha yang disokong oleh kebijakan represif pemerintah Thailand dimana benturan tersebut masih terjadi sampai saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bawa titik mula konflik berkepanjangan Thailand adalah kebijakan yang tidak bijak dari Pemerintah Thailand dalam mengatur warga negaranya.

Kebijakan atau *policy* menurut Carl Friedrich seperti dikutip oleh Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁸ Lebih lanjut Wiilam Dunn mengemukakan bahwa kebijakan publik atau *public policy* adalah rangkaian panjang pilihan-pilihan yang kurang lebih berhubungan, termasuk keputusan untuk tidak berbuat, yang dibuat oleh kantor-kantor atau badan-badan pemerintah.⁹ Atau secara singkatnya, Thomas R. Dye mengemukakan bahwa pengertian dasar kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun dilakukan oleh pemerintah.¹⁰ Adapun pada kajian ini penulis akan menganalisis kebijakan pemerintah Thailand terhadap masyarakat minoritas Muslim khususnya dari etnis Melayu di Thailand dalam kebijakan asimilasi budaya.

Dalam kaitannya dengan masyarakat Muslim Thailand, pemerintah Thailand menerapkan kebijakan asimilasi budaya yang sangat mengekang kebebasan hidup masyarakat Muslim Thailand. Kebijakan tersebut secara garis besar berisi tentang keputusan Pemerintah Thailand menjadikan Thai Budha sebagai identitas dan kebudayaan tunggal negara. Akibat diimplementasikannya kebijakan tersebut, masyarakat Melayu Muslim di Thailand berada pada kondisi yang tertekan. Kebijakan tersebut mengakibatkan *culture shock* karena masyarakat Muslim di Thailand harus merubah cara hidup mereka secara drastis dan berlawanan dengan cara hidup mereka sebelumnya. Terlebih penerapan kebijakan tersebut juga disertai dengan paksaan dan ancaman dari pemerintah. Kondisi sosial tersebut tentunya mengakibatkan dampak psikologis yang berat dan berkepanjangan terhadap masyarakat Muslim di Thailand.

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 3.

⁹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 65.

¹⁰ Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Ofset, 2003), hlm. 1.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan peneliti untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian dapat dideskripsikan dan digambarkan dalam kalimat yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena. Moleong menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹ Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi, *in-depth interview* dan studi pustaka. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahap, yaitu: pengumpulan data (*data collecting*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion*).¹² Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap kehidupan minoritas Muslim di Thailand dalam kurun waktu 2012 sampai 2014. Adapun informan dari penelitian ini adalah: intelektual Muslim di Thailand khususnya Muslim yang berasal dari wilayah selatan, masyarakat Indonesia yang sedang tinggal maupun studi di Thailand dan beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berasal dari Thailand khususnya Thailand Selatan. Adapun studi pustaka dilakukan dengan menelusuri dokumen terkait seperti majalah, surat kabar dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada dampak psikologis yang diakibatkan oleh kebijakan asimilasi budaya yang diterapkan secara paksa oleh Pemerintah Thailand terhadap Muslim Thailand khususnya Melayu Muslim.

D. Kebijakan Asimilasi Budaya: Kekerasan Kultural dan Peperangan Psikologi

Dalam tatanan sosial, Muslim di Thailand mendapatkan julukan yang kurang pantas yaitu *khaek* yang berarti orang luar, pendatang atau tamu. Meskipun pada mulanya *khaek* merupakan istilah untuk makro-etnis bagi orang selain Thai tapi lama kelamaan istilah tersebut dipakai pemerintah untuk mendeskripsikan masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan.¹³ Pergolakan menahun antara Melayu Muslim minoritas dengan

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 6.

¹² Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods* [Analisis Data Kualitatif: Sebuah Buku Sumber Metode Baru], (London: Sage Publication, 1998).

¹³ Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim...* hlm. 5.

pemerintah Thailand menurut Patrick Jory, sebenarnya adalah perseteruan dua etnis, yaitu Melayu dengan etnis Thai sebagai mayoritas. Akan tetapi mengapa pada saat ini menggunakan label agama Islam? Hal ini karena pada masa kolonial, pemerintah berusaha untuk menghilangkan istilah Malay (Melayu) pada masyarakat Thailand selatan dan menggantinya menjadi “Thai-Muslim” atau “Thai-Islam”. Karena identitas melayu akan memberikan kekuatan menumbuhkan semangat nasionalisme dan memicu upaya untuk berpisah dari pemerintah Thailand.¹⁴

Muslim di Thailand pada dasarnya dibedakan menjadi dua kelompok yaitu golongan yang terasimilasi (*assimilated group*) dan golongan yang tidak terasimilasi (*unassimilated group*).¹⁵ Kebijakan asimilasi budaya di Kerajaan Thailand mulai berlaku pada masa pemerintahan Jenderal Phibul Songkhram sebagaimana telah disebutkan di bagian awal penelitian ini. Pada masa pemerintahan Jenderal Phibul Songkhram (1938-1944 dan 1947-1957), kebijakan nasionalisasi budaya Thailand menjadi kebijakan primer negara. Dimulai dari upaya untuk mengasimilasikan bahasa dan budaya Thailand di seluruh penjuru Thailand, termasuk di wilayah selatan yang kemudian menciptakan resistensi dari masyarakat Melayu Muslim yang berbahasa Melayu.¹⁶ Di tahun 1940 diterapkan aturan tertentu tentang cara berpakaian dengan pakaian gaya barat dan kewajiban mengadopsi nama Thai jika seorang Melayu Muslim hendak memasuki sekolah negeri atau ketika hendak melamar pekerjaan pada instansi pemerintah. Akibatnya banyak Melayu Muslim yang gagal masuk sekolah negeri untuk mengakses pendidikan. Di dalam sekolah pun masyarakat Melayu Muslim dilarang menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari.¹⁷ Kebijakan Phibul Songkhram tersebut didukung oleh sistem politik di Thailand yang absolut dan tak tersentuh. Sistem tersebut dalam pemerintahan Thailand

¹⁴ Patrick Jory, “Religious Labeling: From Pattani Malay to Thai Muslim [Pelabelan Agama: Dari Melayu Pattani ke Islam Thai]”, dalam *Asia Research Institute Working Paper Vol. 18, No. 84, 2007*.

¹⁵ Menurut Thanet Aphornsuwan, *assimilated group* adalah golongan yang terasimilasi atau berbaur dengan kaum mayoritas yaitu masyarakat Thai Budha pada segala bidang tatanan kehidupan kecuali masalah keagamaan. Sedangkan *unassimilated group* adalah golongan yang tidak berbaur dengan Thai Budha, melainkan menyendiri di Thailand selatan dimana mereka masih menjaga kultur Melayu Islam pada nama, bahasa dan adat.

¹⁶ Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, *Dialectics of Islam, Politics and Government: A Comparison of Indonesia and Thailand* [Dialektika Islam, Politik dan Pemerintahan: Perbandingan Indonesia dan Thailand], dipresentasikan di 6th Joint International Conference and Graduate Workshop on Islamic Studies Revisited: New Trends in the Study of Islam and Muslim Societies kerjasama Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Filsafat Georg August Universitat Gottingen Jerman (Yogyakarta, 27-30 Oktober, 2015), hlm. 11.

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Hanif, Mahasiswa Jurusan MD UIN Sunan Kalijaga asal Pattani dan Anggota Persatuan Mahasiswa Islam Pattani di Indonesia, (7 Oktober 2015).

disebut dengan “politik birokrasi” dimana pemerintah mengontrol kehidupan Melayu Muslim secara ketat. Kebijakan tersebut pada dasarnya adalah untuk menghilangkan identitas Muslim Thailand khususnya mencegah perlawanan di wilayah selatan.¹⁸

Selain Phibul Songkhram, pemimpin Thailand lainnya yang juga sangat diskriminatif terhadap Muslim adalah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin Shinawatra mengeluarkan sebuah kebijakan represif terhadap muslim di Thailand selatan. Dalam upaya penyelesaian konflik di selatan, Raja Thailand sebenarnya memerintahkan kepada para birokrat negara untuk menempuh jalur pendekatan kesejahteraan. Tapi Thaksin Shinawatra justru memberlakukan darurat militer yang diterapkannya sejak 5 January 2004.¹⁹ Yang lebih diskriminatif adalah pernyataan Thaksin bahwa orang Thailand adalah mereka yang beragama Budha, walaupun tidak beragama Budha mereka harus menggunakan bahasa Thai. Jadi apabila seseorang memeluk agama Islam, menurut perpektif Thaksin orang tersebut bisa disebut orang Thai hanya jika menggunakan bahasa Thai. Sedangkan apabila seseorang beragama Budha, menggunakan bahasa apapun tetaplah dianggap sebagai orang Thai.²⁰ Tentu saja pernyataan tersebut memancing polemik yang lebih besar. Kondisi tersebut menciptakan stigma bahwa Muslim adalah kelompok kriminal dibalik agama. Hal tersebut pada akhirnya menjadi alasan bagi militer Thailand untuk men-*deploy* operasi militer di wilayah selatan.

Apa yang terjadi terhadap Melayu Muslim di Thailand dapat dikatakan sebagai kekerasan kultural. Kekerasan kultural yang dimaksud adalah aspek budaya, ranah simbolik eksistensi kita ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan yang bersifat empirik dan ilmu pengetahuan yang bersifat formal yang dapat digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau struktural.²¹ Sampai saat ini minoritas Melayu Muslim di Thailand masih jauh dari kelapangan dalam menjalani hidup. Karena mereka tetap menjadi minoritas yang terus mendapatkan tekanan dan diskriminasi yang tiada henti. Kondisi tersebut apabila terjadi secara terus menerus

¹⁸ Wawancara dengan Theresia Octastefani, Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM dan Alumni Burapha University Thailand, (6 November 2015).

¹⁹ Wawancara dengan Abdullah Dahamae, Anggota Muslim Club Burapha University Thailand yang berasal dari Provinsi Pattani, (16 November 2015).

²⁰ Wawancara dengan Maropee Kaseng, Presiden Muslim Club Burapha University Thailand, (16 November 2013)

²¹ Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 429.

dapat menimbulkan efek traumatik akut pada seorang manusia. Dalam psikologi psikoanalisis disebutkan bahwa konsepsi psikologi tentang manusia dipengaruhi oleh perkembangan kepribadian, sosialisasi, identifikasi, agresi, kebudayaan dan perilaku.²² Dalam perspektif psikoanalitik disebutkan bahwa seseorang akan merespon terhadap situasi yang menimbulkan kecemasan. Psikoanalitis erat kaitannya dengan agresi, sebagaimana dikemukakan oleh Sigmund Freud bahwa agresi adalah suatu naluri yang berarti bahwa orang melakukan agresi untuk mengekspresikan keinginan pembawaan.²³ Kartini Kartono menyatakan bahwa ada tiga faktor penyebab gangguan psikologis yaitu faktor organis atau somatis; faktor struktur kepribadian dan faktor sosial atau lingkungan.²⁴

Di Thailand, perubahan lingkungan akibat kebijakan asimilasi budaya secara sosial berdampak buruk terhadap Muslim. Bahkan dapat dikatakan bahwa kebijakan asimilasi budaya adalah suatu bentuk perang secara psikologis. Tujuan perang psikologi tersebut adalah berusaha untuk melemahkan moral spirit masyarakat Melayu Muslim dan mempengaruhi taraf keutuhannya. Perang psikologi juga menumbuhkan rasa gentar, ngeri, takut. Perang psikologi ini juga untuk memasukkan pengaruh dan corak pemikiran Thai Budha serta memaksa orang Melayu Muslim menerima realita secara paksa. Hal ini erat kaitannya dengan politik identitas, dimana politik identitas adalah aspek politik yang memfokuskan pada perbedaan mayor yang berpengaruh pada kebebasan, toleransi dan kebebasan akan aturan, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan intoleransi, kekerasan dan konflik etnis. Atau dengan bahasa yang lebih muda, politik identitas terkait dengan rasisme, bio-feminis dan lingkungan.²⁵

Di sini masyarakat Melayu Muslim terus menerima tekanan untuk mengganti identitas mereka secara paksa. Namun masyarakat Melayu Muslim melakukan perlawanan yang kemudian memicu konflik berkepanjangan. Muslim Thailand merasa bahwa harga diri kelompoknya diinjak-injak oleh kesewenang-wenangan pemerintah Thailand. Lebih buruk lagi, kebijakan asimilasi budaya juga membuat orang Thai kerap menaruh perasaan curiga terhadap Melayu Muslim. Stigma tersebut terbentuk akibat perang psikologi yang terus

²² Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 19.

²³ Rita Atkinson et al., *Pengantar Psikologi Jilid Satu*, (Batam: Interaksa, 1993), hlm. 28.

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 8.

²⁵ Agnes Heller yang dikutip oleh Ubed Abdillah, *Politik Identitas Etnis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2002), hlm. 22.

dilancarkan oleh pemerinth Thailand. Meskipun juga diakui bahwa tidak semua orang Thai membenci Muslim.²⁶ Observasi penulis menunjukkan bahwa sebagian orang Thai juga menaruh respek terhadap Melayu Muslim. Dengan melihat fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa kondisi Melayu Muslim hingga saat ini sebagian besar masih dalam kondisi psikologis yang buruk. Buruknya kondisi psikologis tersebut dapat memicu konflik yang lebih besar dan rumit, seperti munculnya kelompok-kelompok yang ingin membawa Pattani menjadi negara merdeka seperti Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan Pattani United Liberation Organization (PULO).

E. Kesimpulan

Kerajaan Thailand adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Budha dimana Budha merupakan agama resmi negara. Di Thailand, Islam merupakan minoritas yang berkembang cepat dimana mereka mayoritas berada di wilayah selatan yaitu di Provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat ditambah dengan sebagian Satun dan Songkhla. Kawasan tersebut menjadi sebuah daerah rawan konflik dengan latar belakang agama dan etnis. Terlebih Thailand beberapa kali dipimpin oleh rezim yang sangat mendiskriminasi masyarakat Melayu Muslim seperti Jenderal Phibul Songkhram dan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dimana masyarakat Melayu Muslim menjadi sasaran mangsa asimilasi kebudayaan. Muslim dipaksa untuk menanggalkan identitas Melayu Islam dan mengganti dengan segala bentuk identitas bercorak Thailand dan Budha. Hingga saat ini komunitas Melayu Muslim minoritas khususnya di wilayah selatan masih terus menghadapi diskriminasi yang komplek serta teror yang massif dan terjadi secara terus-menerus sehingga kehidupan mereka menjadi sangat tertekan. Mau tidak mau kebijakan asimilasi budaya tersebut menyebabkan *culture shock* yang secara psikologis berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Melayu Muslim di Thailand. Masyarakat Melayu Muslim pun kemudian berdiri melakukan perlawanan dalam kurun waktu yang panjang. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan asimilasi budaya adalah suatu bentuk perang psikologi untuk menimbulkan rasa takut dan gentar serta melemahkan moral spirit masyarakat Melayu Muslim yang kemudian mempengaruhi taraf keutuhannya. Kebijakan

²⁶ Perbincangan dengan Ibrahim, Pedagang Makanan Halal di Bangsaen Chonburi dan Khatib di *Central Masjid of Chonburi*, (5 Desember 2012).

asimilasi budaya tersebut juga membuat orang Thai kerap menaruh perasaan curiga terhadap Melayu Muslim. Konflik ini erat kaitannya dengan politik identitas, dimana terjadi benturan pengaruh antar kelompok yang menimbulkan intoleransi, kekerasan dan konflik etnis. Hingga saat ini sebagian besar Melayu Muslim masih dalam kondisi psikologis yang buruk. Buruknya kondisi psikologis tersebut dapat memicu konflik yang lebih besar dan munculnya kelompok separatis seperti Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan Pattani United Liberation Organization (PULO). Terlepas bahwa saat ini modernisasi telah merambah semua negara dan Thailand menjadi negara yang lebih demokratis, masyarakat Melayu Muslim di Thailand mulai dipandang positif oleh komunitas yang lainnya yang memunculkan harapan baru dalam memperbaiki relasi antara Muslim-pemerintah yang memberikan ruang lebih luas bagi umat Muslim Thailand, namun faktanya minoritas Melayu Muslim di Thailand masih jauh dari ketenangan dalam hidup. Karena mereka tetap menjadi minoritas yang mendapatkan tekanan dan diskriminasi secara psikologis.

F. Referensi

- Abdillah, Ubed, *Politik Identitas Etnis*, Magelang: Indonesia Tera, 2002.
- Affandi, Hakimul Ikhwan, *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Alwi, Al-Habib, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Aphornsuvan, Thanet, *History and Politics of the Muslim in Thailand* [Sejarah dan Politik Muslim di Thailand], Bangkok: Thammasat University, 2003.
- Atkinson, Rita et al., *Pengantar Psikologi Jilid Satu*, Batam: Interaksa, 1993.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Galtung, Johan, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Jory, Patrick, "Religious Labeling: From Pattani Malayu to Thai Muslim [Pelabelan Agama: Dari Melayu Pattani ke Islam Thai]", dalam *Asia Research Institute Working Paper Vol. 18, No. 84*, 2007.

- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma, *Dialectics of Islam, Politics and Government: A Comparison of Indonesia and Thailand* [Dialektika Islam, Politik dan Pemerintahan: Perbandingan Indonesia dan Thailand], dipresentasikan di 6th Joint International Conference and Graduate Workshop on Islamic Studies Revisited: New Trends in the Study of Islam and Muslim Societies kerjasama Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Filsafat Georg August Universitas Gottingen Jerman (Yogyakarta, 27-30 Oktober, 2015).
- Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma dan Theresia Octastefani, *Pattani United Liberation Organization: From Jihad to Local Politics Movement* [Organisasi Pembebasan Pattani Bersatu: Dari Jihad ke Gerakan Politik Lokal], dipresentasikan di National Conference and Call for Papers Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, 25-26 Februari 2016.
- Mahmud, Nik Anuar Nik, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1885-1954*, Negeri Sembilan: Saremban, 2004.
- Miles, Matthew B. dan Michael A. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods* [Analisis Data Kualitatif: Sebuah Buku Sumber Metode Baru], London: Sage Publication, 1998.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Siddiqi, M. Yasin Mazhar, *The Prophet Muhammad SAW: A Role Model for Muslim Minorities* [Nabi Muhammad SAW: Sebuah Model Peran Untuk Minoritas Muslim], Leicestershire: The Islamic Foundation, 2006.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S., *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset, 2003.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

G. Wawancara

Abdullah Dahamae, Muslim Club Burapha University Thailand, 16 November 2015.

Ibrahim, Central Masjid of Chonburi Thailand, 5 Desember 2012.

Maropee Kaseng, Muslim Club Burapha University Thailand, 16 November 2013

Muhammad Hanif, Jurusan MD UIN Sunan Kalijaga, 7 Oktober 2015.

Theresia Octastefani, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 6 November 2015.

Bayu Mitra Adhyatma Kusuma adalah peneliti di Pusat Studi Islam Asia Tenggara dan pengajar di Prodi MD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alumnus program *linkage double degree* antara MAP Universitas Brawijaya Malang dan MIP Burapha University Chonburi Thailand melalui program beasiswa unggulan *Fast Track* dari Dirjen Dikti Kemendikbud RI. Mantan pengajar *Department of Indonesian Studies* di Burapha University International College Thailand.

